

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJM maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja).

Selanjutnya Rencana Kerja OPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selanjutnya dibahas dalam Forum SKPD dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan – RKPD setiap tahunnya dan sebagai bahan Musrenbang RKPD.

Sesuai dengan aturan-aturan diatas maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2021 urusan penunjang bidang kepegawaian didasarkan pada :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja OPD terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa, penyusunan Renja-OPD ini tentu harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang lebih tinggi dan sesuai dengan tata cara penyusunan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

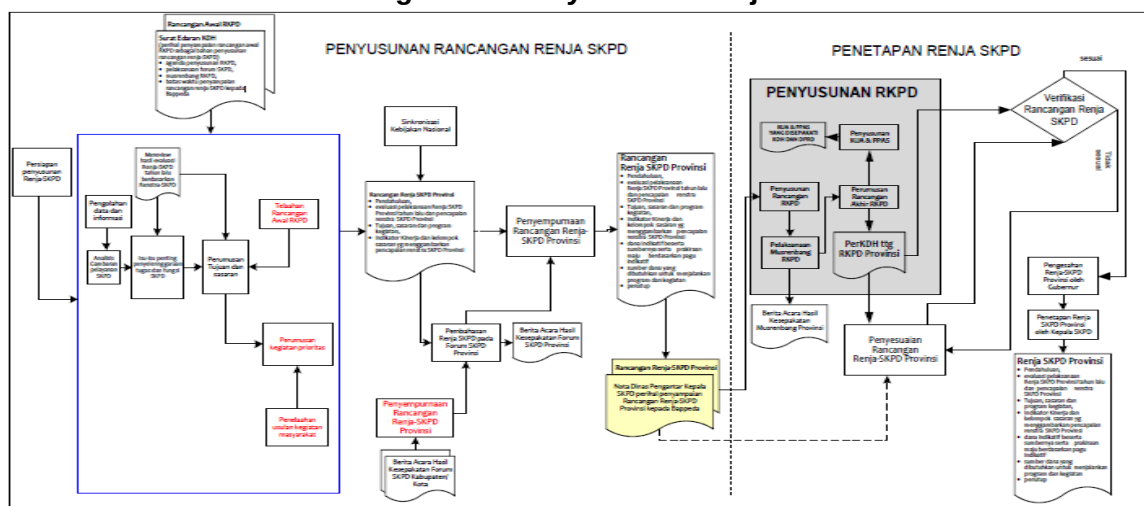
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pada tahun 2021 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Periode 2019-2023, sehingga seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu melakukan akselerasi dalam pencapaian sasaran didalam RPJMD. Untuk itu berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mempercepat tercapainya saran antara lain :

1. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB, terjadi tuntutan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategi, kebijakan dan program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.
2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
3. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
4. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mekanisme penyusunan Renja-OPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja-OPD



Sesuai dengan Dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Tujuan : ” Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit”, dengan indikator tujuan yakni “Nilai Tingkat Penerapan Sistem Merit”. Untuk mencapai tujuan dan indikator OPD tersebut telah dijabarkan kedalam 4 (empat) Sasaran antara lain:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan dngan indikator Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan;
2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi ASN sesuai Kompetensinya dengan indikator Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi;
3. Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin dengan indikator Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan;
4. Meningkatnya Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi dengan indikator Nilai Aspek Sistem Informasi.

Oleh sebab itu, guna mencapai Tujuan dan sasaran tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Renja OPD Tahun 2020 sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penunjang Bidang Kepegawaian, menjalankan Misi Ke-2 Gubernur Nusa Tenggara Barat yang tertuang didalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 yakni “NTB BERSIH DAN MELAYANI” dimana Pemerintah Provinsi NTB berfokus kepada percepatan/ Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang Bersih dan Melayani.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan berdasarkan landasan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menetri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2020 Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN;
16. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang tata Cara Penilaian Mandiri Sistem merit dalam Manajemen ASN
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan dan review pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan tahun 2023;
2. Menetapkan indikator kinerja dari program dan kegiatan yang disertai indikasi perkiraan kebutuhan pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023;
3. Mengukur / mengevaluasi pencapaian target kinerja OPD;
4. Mengendalikan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- Bab II : Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V : Penutup

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja tahun 2021 bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD belum bisa dilakukan, hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang nomenkelatur Program/kegiatan dan sub Kegiatan sebagai tindak lanjut dari amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. berikut kami sajikan Capaian Renstra BKD Provinsi NTB tahun 2019 s.d. 2021 :

Tabel 3.6
Capaian Renstra BKD Provinsi NTB tahun 2019 s.d. 2021

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
A	Meningkatnya Layanan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			84.79 6.185 .552	-	-	-	-	27.71 0.610 .357		28.12 3.928 .668		28.96 1.646 .528	-	-	-	-	16.06 9.058 .267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 %	57,9 9	-	-	-	-		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	BB		587.2 71.00 0	-	-	-	-	190.0 00.00 0	B	195.7 00.00 0	B	201.5 71.00 0	-	-	-	-	85.37 0.056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 %	44,9 3	-	-	-	-		
1, 1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3 Dokumen	46.36 3.500	-	-	-	-	1 Dokumen	15.00 0.000	15.45 0.000	1 Dokumen	15.91 3.500	-	-	-	-	1 Dokumen	12.64 7.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 %	84,3 1	-	-	-	-		

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
							2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022	2023	2019	2020		2021		2022	2023								
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Daerah																																				
1, 2	Meningkatnya Kualitas Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.450.000	1 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	1 Dokumen	7.143.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	47,62	-	-	-	-	
1, 3	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.450.000	1 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	1 Dokumen	7.240.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	48,27	-	-	-	-	
1, 4	Meningkatnya Kualitas Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.450.000	1 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	36,87	-	-	-	-	
1, 5	Meningkatnya KualitasPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.450.000	1 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	1 Dokumen	4.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	28,93	-	-	-	-	
1, 6	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan RKDP dan RENJA OPD	4 Dokumen	12 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	15.450.000	4 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	3 Dokumen	12.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	83,00	-	-	-	-	
1, 7	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD	1 Dokumen	3 Dokumen	309.090.000	-	-	-	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	-	-	-	-	1 Dokumen	36.020.056	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	36,02	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022	2023	2019		2020		2021		2022		2023					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Daerah	Nilai Sakip BKD	BB		75.19 8.615 .901	-	-	-	-	B	24.32 9.035 .524		25.05 8.906 .590	B	25.81 0.673 .787	-	-	-	-	B	14.19 4.375 .705	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	58,34	-	-	-	-	
2, 1	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	90 orang	90 orang	74.64 2.253 .901	-	-	-	-	90 orang	24.14 9.035 .524	90 orang	24.87 3.506 .590	90 orang	25.61 9.711 .787	-	-	-	-	30 orang	14.13 5.800 .005	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	58,54	-	-	-	-	
2, 2	Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD	150 Dokumen	450 Dokumen	30.90 9.000	-	-	-	-	150 Dokumen	10.00 0.000	150 Dokumen	10.30 0.000	150 Dokumen	10.60 9.000	-	-	-	-	150 Dokumen	2.216 .600	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	22,17	-	-	-	-	
2, 3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPTB/GU	12 Dokumen	36 Dokumen	370.9 08.00 0	-	-	-	-	12 Dokumen	120.0 00.00 0	12 Dokumen	123.6 00.00 0	12 Dokumen	127.3 08.00 0	-	-	-	-	12 Dokumen	36.49 4.800	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	30,41	-	-	-	-	
2, 4	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Keuangan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen	12 Dokumen	30.90 9.000	-	-	-	-	4 Dokumen	10.00 0.000	4 Dokumen	10.30 0.000	4 Dokumen	10.60 9.000	-	-	-	-	3 Dokumen	1.284 .600	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	12,85	-	-	-	-	
2, 5	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	3 Dokumen	30.90 9.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.00 0.000	1 Dokumen	10.30 0.000	1 Dokumen	10.60 9.000	-	-	-	-	1 Dokumen	6.570 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	65,70	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2, 6	Meningkatnya Kecepatan/Ketepatan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Hasil Tanggapan Pemeriksaan LHP/NHP	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP	1 Dokumen	3 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	1 Dokumen	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	30,00	-	-	-	-	
2, 7	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	12 Dokumen	36 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.300.000	12 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	12 Dokumen	6.605.500	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	66,06	-	-	-	-	
2, 8	Meningkatnya Akurasi Pelaporan Realisasi Anggaran	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	1 Dokumen	2.404.200	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	24,04	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dengan Kualitas Baik	0,9	1	169.999.500	-	-	-	-	1	55.000.000	1	56.650.000	1	58.349.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
3, 1	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	3 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
3, 2	Meningkatnya Pengamanan Barang Milik Daerah BMD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Aset	1 Dokumen	3 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
3, 3	Meningkatnya Kualitas Penilaian BMD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Aset yang dinilai	5 item	15 item	15.454.500	-	-	-	-	5 item	5.000.000	5 item	5.150.000	5 item	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16	
3, 4	Meningkatnya Kualitas, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Daftar Inventaris Barang	12 Daftar	36 Daftar	15.45	4.500	-	-	-	-	12 Daftar	5.000	.000	12 Daftar	5.150	.000	12 Daftar	5.304	.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3, 5	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi dan Laporan BMD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset	2 Berita Acara	6 Berita Acara	15.45	4.500	-	-	-	-	2 Berita Acara	5.000	.000	2 Berita Acara	5.150	.000	2 Berita Acara	5.304	.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3, 6	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan BMD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD	12 Dokumen	36 Dokumen	77.27	2.500	-	-	-	-	12 Dokumen	25.00	0.000	12 Dokumen	25.75	0.000	12 Dokumen	26.52	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3, 7	Meningkatnya Pemanfaatan BMD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset yang dapat dimanfaatkan	1 Dokumen	3 Dokumen	15.45	4.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000	.000	1 Dokumen	5.150	.000	1 Dokumen	5.304	.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	0,9	1	108.181.500	0	-	-	-	-	1	35.000.000	0	1	36.050.000	0	1	37.131.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4, 1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	3 dokumen	30.90	9.000	-	-	-	-	1 Dokumen	10.00	0.000	1 Dokumen	10.30	0.000	1 Dokumen	10.60	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4, 2	Meningkatnya Kualitas Analisis Kebijakan Retribusi Daerah	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Kerjasama Potensi Retribusi Daerah	2 Kegiatan	6 kegiatan	-	-	-	-	-	-	2 Kegiatan	-	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4, 3	Meningkatnya Sosialisasi Potensi Retribusi Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi potensi Retribusi Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4, 4	Meningkatnya Kualitas data objek retribusi daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek retribusi Daerah	10 objek	10 objek	-	-	-	-	-	10 objek	-	10 objek	-	10 objek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4, 5	Meningkatnya jumlah potensi retribusi daerah	Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah potensi retribusi daerah	10 dokumen	30 dokumen	77.272.500	-	-	-	-	10 dokumen	25.000.000	10 dokumen	25.750.000	10 dokumen	26.522.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4, 6	Meningkatnya ketepatan wajib retribusi daerah	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah penetapan wajib retribusi daerah	10 dokumen	30 dokumen	-	-	-	-	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	10 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4, 7	Meningkatnya Laporan retribusi daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen laporan retribusi daerah	1 dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Layanan	0,9	1	370.908.000	-	-	-	-	1	120.000.000	1	123.600.000	1	127.308.000	-	-	-	-	1	28.823.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5, 1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 jenis	2 jenis	15.454.500	-	-	-	-	2 jenis	5.000.000	2 jenis	5.150.000	2 jenis	5.304.500	-	-	-	-	1 jenis	2.098.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5, 2	Meningkatnya Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	3 item	3 item	92.727.000	-	-	-	-	3 item	30.000.000	3 item	30.900.000	3 item	31.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5, 3	Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penanganan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.454.500	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab		
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5, 4	Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate dalam sistem Kepegawaian	90 dokumen	90 dokumen	15.45	4.500	-	-	-	-	90 dokumen	5.000	90 dokumen	5.150	90 dokumen	5.304	500	-	-	-	-	30 dokumen	25.00	0.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	500,00	-	-	-	-
5, 5	Mningkatnya ketepatan dan Kecepatan pelaporan kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai	90 Laporan	90 Laporan	15.45	4.500	-	-	-	-	90 Laporan	5.000	90 Laporan	5.150	90 Laporan	5.304	500	-	-	-	-	30 Laporan	749.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	14,99	-	-	-	-
5, 6	Meningkatnya Apresiasi Pegawai Pensiun	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah apresiasi pegawai pensiun	2 Pegawai	2 Pegawai	-	-	-	-	-	-	2 Pegawai	-	2 Pegawai	-	2 Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-		
5, 7	Meningkatnya Kecepatan dan Pelayanan terhadap pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	jumlah pelayanan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-		
5, 8	Meningkatnya Apresiasi Pegawai yang Pindah Tugas	Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas	10 pegawai	30 Pegawai	30.90	9.000	-	-	-	-	10 pegawai	10.00	10 pegawai	10.30	10 pegawai	10.60	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-		
5, 9	Meningkatnya Pengebangan kapasitas Pegawai melalui DIKLAT	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT	20 pegawai	60 Pegawai	154.50	45.000	-	-	-	-	20 pegawai	50.000	20 pegawai	51.50	0.000	20 pegawai	53.04	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-		

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019	2020	2021		2022		2023		2019	2020	2021		2022	2023	2019	2020	2021	2022		2023											
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11		12	13	14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
0, 2, 1, 5	Meningkatnya pemahaman terhadap Peraturan perundangan g-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan perundangan g-undangan yang disosialisasikan	4 Aturan	12 Aturan	15.454.500	-	-	-	-	4 Aturan	5.000.000	4 Aturan	5.150.000	4 Aturan	5.304.500	-	-	-	-	4 Aturan	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	7,50	-	-	-	-
0, 2, 1, 6	Meningkatnya kemampuan teknis pelaksanaan peraturan perundangan g-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundangan g-undangan	4 aturan	12 Aturan	15.454.500	-	-	-	-	4 aturan	5.000.000	4 aturan	5.150.000	4 aturan	5.304.500	-	-	-	-	4 Aturan	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	12,00	-	-	-	-
6	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Logistik Kantor	1	1	3.801.807.000	-	-	-	-	1	1.230.000.000	1	1.266.900.000	1	1.304.907.000	-	-	-	-	1	679.552.674	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	55,25	-	-	-	-
6, 1	Meningkatnya Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis	40 Jenis	92.727.000	-	-	-	-	20 jenis	30.000.000	20 jenis	30.900.000	20 jenis	31.827.000	-	-	-	-	15 Jenis	6.781.300	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	22,60	-	-	-	-
6, 2	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	18 Jenis	-	-	-	-	-	6 jenis	-	6 jenis	-	6 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	
6, 3	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	9 Jenis	61.818.000	-	-	-	-	3 jenis	20.000.000	3 jenis	20.600.000	3 jenis	21.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022	2023	2019	2020		2021		2022	2023									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6, 4	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Kantor yang tersedia	12 bulan	36 Bulan	1.081.815.000	-	-	-	-	12 bulan	350.000.000	12 bulan	360.500.000	12 bulan	371.315.000	-	-	-	-	12 Bulan	303.181.700	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	86,62	-	-	-	-	
6, 5	Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5 jenis	15 jenis	30.909.000	-	-	-	-	5 jenis	10.000.000	5 jenis	10.300.000	5 jenis	10.609.000	-	-	-	-	5 jenis	48.590.400	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	48,90	-	-	-	-	
6, 6	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 jenis	15 Jenis	92.727.000	-	-	-	-	5 jenis	30.000.000	5 jenis	30.900.000	5 jenis	31.827.000	-	-	-	-	5 Jenis	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	46,00	-	-	-	-	
6, 7	Meningkatnya Ketersediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	2 jenis	6 Jenis	61.818.000	-	-	-	-	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.600.000	2 jenis	21.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
6, 8	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	80 kali	240 kali	185.454.000	-	-	-	-	80 kali	60.000.000	80 kali	61.800.000	80 kali	63.654.000	-	-	-	-	80 kali	37.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	62,50	-	-	-	-	
6, 9	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kali	300 Kali	1.854.540.000	-	-	-	-	100 kali	600.000.000	100 kali	618.000.000	100 kali	636.540.000	-	-	-	-	100 Kali	249.999.274	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	41,67	-	-	-	-	
6. 10	Meningkatnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata	7 bidang	7 Bidang	309.090.000	-	-	-	-	7 bidang	100.000.000	7 bidang	103.000.000	7 bidang	106.090.000	-	-	-	-	7 Bidang	19.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	19,70	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Suابعegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6.1.1	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah fasilitas e-governmennt	3 aplikasi	3 Aplikasi	30.909.000	-	-	-	-	3 aplikasi	10.000.000	3 aplikasi	10.300.000	3 aplikasi	10.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
7	Meningkatnya Ketersediaan barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Fisik RKBM	0,2	0	1.000.000.000	-	-	-	-	0	600.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	-	-	-	-	0	128.925.400	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	21,49	-	-	-	-	
7.1	Meningkatnya Ketersediaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	-	5 unit	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
7.2	Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 unit	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
7.3	Meningkatnya ketersediaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	40 unit	40 unit	200.000.000	-	-	-	-	40 unit	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
7.4	Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan Mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	4 paket	12 paket	600.000.000	-	-	-	-	4 paket	200.000.000	4 paket	200.000.000	4 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7, 5	Meningkatnya Ketersediaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Pengadaan Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang Tersedia	2 paket	2 paket	-	-	-	-	-	2 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-	
7, 6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Tersedia	1 paket	2 paket	200.000.000	-	-	-	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	11,96	-	-	-	-	-	
7, 7	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	-	
8	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	1	1	2.230.315.651	-	-	-	-	1	721.574.833	1	743.222.078	1	765.518.740	-	-	-	-	1	747.723.178	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	103,62	-	-	-	-	-
8, 1	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Surat menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat yang tersedia	6000 surat	1800 surat	15.454.500	-	-	-	-	600 surat	5.000.000	600 surat	5.150.000	600 surat	5.304.500	-	-	-	-	600 surat	5.974.800	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	119,50	-	-	-	-	-
8, 2	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	36 bulan	854.865.151	-	-	-	-	12 bulan	276.574.833	12 bulan	284.872.078	12 bulan	293.418.240	-	-	-	-	12 bulan	237.848.378	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	86,00	-	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022		2023		2019	2020		2021		2022		2023						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
8, 3	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 jenis	6 jenis	61.818.000	-	-	-	-	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.600.000	2 jenis	21.218.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	-	-	-	
8, 4	Meningkatnya Ketersediaan pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	16 orang	48 orang	1.298.178.000	-	-	-	-	14 orang	420.000.000	16 orang	432.600.000	16 orang	445.578.000	-	-	-	-	16 orang	503.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	119,98	-	-	-	-	
9	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	0,9	1	1.329.087.000	-	-	-	-	1	430.000.000	1	442.900.000	1	456.187.000	-	-	-	-	1	204.288.054	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	47,51	-	-	-	-	
9, 1	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara	37 unit	37 unit	618.180.000	-	-	-	-	37 unit	200.000.000	37 unit	206.000.000	37 unit	212.180.000	-	-	-	-	37 unit	120.905.055	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	60,45	-	-	-	-	
9, 2	Meningkatnya ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	2 unit	2 unit	46.363.500	-	-	-	-	2 unit	15.000.000	2 unit	15.450.000	2 unit	15.913.500	-	-	-	-	1 unit	17.999.999	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	120,00	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023		Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
							2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19=14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9, 3	Meningkatnya masa pakai Mebel	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	2 unit	2 unit	15.45 4.500	-	-	-	-	2 unit	5.000 .000	2 unit	5.150 .000	2 unit	5.304 .500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 %	0,00	-	-	-	-	-
9, 4	Meningkatnya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	37 unit	37 unit	30.90 9.000	-	-	-	-	37 unit	10.00 0.000	37 unit	10.30 0.000	37 unit	10.60 9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 %	0,00	-	-	-	-	-
9, 5	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	1 gedung	1 gedung	309.0 90.000	-	-	-	-	1 gedung	100.0 00.000	1 gedung	103.0 00.000	1 gedung	106.0 90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 %	0,00	-	-	-	-	-
9, 6	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung Kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	1 tahun	3 tahun	154.5 45.000	-	-	-	-	1 tahun	50.00 0.000	1 tahun	51.50 0.000	1 tahun	53.04 5.000	-	-	-	-	-	1 tahun	12.57 0.000	-	-	-	-	-	-	-	30 %	25,14	-	-	-	-	-
9, 7	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang terpelihara/terrehabilitasi	1 tahun	3 tahun	154.5 45.000	-	-	-	-	1 tahun	50.00 0.000	1 tahun	51.50 0.000	1 tahun	53.04 5.000	-	-	-	-	-	1 tahun	52.81 3.000	-	-	-	-	-	-	-	30 %	105,63	-	-	-	-	-
B	Meningkatnya Kualitas Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit	237, 5	373	9.940 .026	-	-	-	-	315	3.215 .963	348	3.312 .442 886	373	3.411 .816 173	-	-	-	-	-	373	1.418 .071 365	-	-	-	-	-	-	-	30 %	44,09	-	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=12/7*100%	18=13/8*100%	19-14/9*100%	20=15/10*100%	21=16/11*100%	16															
1	2	3	4	5	6	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16				
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi	81			3.433.878.526	-	-	-	-	96	1.110.963.967	99	1.144.292.886	102	1.178.621.673	-	-	-	-	102	781.104.848	-	-	-	-	-	-	-	30%	70,31	-	-	-	-
1, 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK	1500 Formasi	4500 formasi	30.909.000	-	-	-	-	1500 Formasi	10.000.000	1500 Formasi	10.300.000	1500 Formasi	10.609.000	-	-	-	-	1500 formasi	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	6,00	-	-	-	-
1, 2	Meningkatnya Kualitas perencanaan Kebutuhan untuk Pelaksanaan PNS/PPPK	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK	400 formasi	1200 formasi	92.727.000	-	-	-	-	400 formasi	30.000.000	400 formasi	30.900.000	400 formasi	31.827.000	-	-	-	-	400 formasi	10.070.844	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	33,57	-	-	-	-
1, 3	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pegawai	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/PPK terseleksi	400 orang	1200 orang	1.545.450.000	-	-	-	-	400 orang	500.000.000	400 orang	515.000.000	400 orang	530.450.000	-	-	-	-	400 orang	654.601.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	130,92	-	-	-	-
1, 4	Mningkatnya Transparansi Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK	10 kab/kota	10 Kab/kota	154.545.000	-	-	-	-	10 kab/kota	50.000.000	10 kab/kota	51.500.000	10 kab/kota	53.045.000	-	-	-	-	10 Kab/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
1, 5	Meningkatnya Kualitas Perumusan bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 kegiatan	3 kegiatan	30.909.000	-	-	-	-	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.300.000	1 kegiatan	10.609.000	-	-	-	-	1 kegiatan	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	10,00	-	-	-	-
1, 6	Meningkatnya Ketepatan Waktu Pensiun ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	245 SK	735 SK	247.272.000	-	-	-	-	245 SK	80.000.000	245 SK	82.400.000	245 SK	84.872.000	-	-	-	-	300 SK	20.946.770	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	26,18	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
1, 7	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pemberhentian ASN	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	1 dokumen	3 Dokumen 30.90 9.000	-	-	-	-	1 dokumen 10.00 0.000	1 dokumen 10.30 0.000	1 dokumen 10.60 9.000	10.60 9.000	-	-	-	-	1 Dokumen 6.518 .820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	65 ,19	-	-	-	-			
1, 8	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	4 kegiatan	12 Kegiatan 432.7 26.000	-	-	-	-	2 kegiatan 140.0 00.000	4 kegiatan 144.2 00.000	4 kegiatan 148.5 26.000	148.5 26.000	-	-	-	-	4 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	0,00	-	-	-	-			
1, 9	Meningkatnya kualitas database pengelola data dan informasi ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Aplikasi	3 Asplikasi 154.5 45.000	-	-	-	-	1 Aplikasi 50.00 0.000	1 Aplikasi 51.50 0.000	1 Aplikasi 53.04 5.000	53.04 5.000	-	-	-	-	1 Asplikasi 2.615 .000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	5,23	-	-	-	-			
1. 1 0	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	13.950 Pegawai	14.143 Pgaawai 281.1 60.526	-	-	-	-	14.143 Pgaawai 90.96 3.967	14.143 Pgaawai 93.69 2.886	14.143 Pgaawai 96.50 3.673	96.50 3.673	-	-	-	-	14.143 Pgaawai 74.26 7.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	81,64	-	-	-	-				
1. 1 1	Meningkatnya ketersediaan Dokumen Kepegawian secara Elektronik	Pengelolaan Data Kepegawian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi	13.950 Pegawai	13.950 Pegawai 216.3 63.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai 70.00 0.000	13.950 Pegawai 72.10 0.000	13.950 Pegawai 74.26 3.000	74.26 3.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	0,00	-	-	-	-				
1. 1 2	Meningkatnya evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	13.950 Pegawai	13.950 Pegawai 216.3 63.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai 70.00 0.000	13.950 Pegawai 72.10 0.000	13.950 Pegawai 74.26 3.000	74.26 3.000	-	-	-	-	13.950 Pegawai	10.48 5.075	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	14,98	-	-	-	-				
2	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	20	33 2.534 .538.000	-	-	-	-	33 820.0 00.000	33 844.6 00.000	33 869.9 38.000	869.9 38.000	-	-	-	-	33	521.8 32.49 2	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	63,64	-	-	-	-				
2, 1	Meningkatnya Ketepatan Penempatan PNS/PTT	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK	690 SK 309.0 90.000	-	-	-	-	230 SK 100.0 00.000	230 SK 103.0 00.000	230 SK 106.0 90.000	106.0 90.000	-	-	-	-	230 SK	23.63 3.525	-	-	-	-	-	-	-	-	30 0%	23,63	-	-	-	-				

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
2, 2	Meningkatnya Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK	9000 SK	989.088.000	-	-	-	-	3000 SK	320.000.000	3000 SK	329.600.000	3000 SK	339.488.000	-	-	-	-	3000 SK	114.258.861	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	35,71	-	-	-	-	
2, 3	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Jabatan Struktural ASN sesuai dengan kompetensinya	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebanan dalam Jab. Struktural	400 SK	990 SK	1.236.360.000	-	-	-	-	400 SK	400.000.000	330 SK	412.000.000	330 SK	424.360.000	-	-	-	-	330 SK	383.940.106	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	95,99	-	-	-	-	
3	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	39		2.534.538.000	-	-	-	-	69	820.000.000	99	844.600.000	119	869.938.000	-	-	-	-	119	70.273.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	8,57	-	-	-	-	
3, 1	Meningkatnya Produktifitas Kinerja ASN melalui Konseling	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling	30 pegawai	90 Pegawai	61.818.000	-	-	-	-	30 pegawai	20.000.000	30 pegawai	20.600.000	30 pegawai	21.218.000	-	-	-	-	30 Pegawai	5.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	27,95	-	-	-	-	
3, 2	Meningkatnya Informasi Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensi	400 orang	120 orang	556.362.000	-	-	-	-	400 orang	180.000.000	400 orang	185.400.000	400 orang	190.962.000	-	-	-	-	400 orang	2.220.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	1,23	-	-	-	-	
3, 3	Meningkatnya kualitas Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	100 pegawai	300 pegawai	30.909.000	-	-	-	-	100 pegawai	10.000.000	100 pegawai	10.300.000	100 pegawai	10.609.000	-	-	-	-	100 pegawai	655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	6,55	-	-	-	-	
3, 4	Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	80 orang	240 orang	927.270.000	-	-	-	-	80 orang	300.000.000	80 orang	309.000.000	80 orang	318.270.000	-	-	-	-	80 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16	
3, 5	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	10 kerjasama	30 kerjasama	154.545.000	-	-	-	-	10 kerjasama	50.000.000	10 kerjasama	51.500.000	10 kerjasama	53.045.000	-	-	-	-	10 kerjasama	28.889.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	57,78	-	-	-	-
3, 6	Meningkatnya Pembinaan dan Supervisi Pemetaan Kompetensi ASN	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN	10 Dokumen	30 Dokumen	154.545.000	-	-	-	-	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	51.500.000	10 Dokumen	53.045.000	-	-	-	-	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
3, 7	Meningkatnya Kualitas Pola Pengembangan Karir ASN	Evaluasi Hasil Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta	300 Pegawai	900 Pegawai	154.545.000	-	-	-	-	300 Pegawai	50.000.000	300 Pegawai	51.500.000	300 Pegawai	53.045.000	-	-	-	-	300 Pegawai	10.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	21,79	-	-	-	-
3, 8	Meningkatnya sertifikasi jabatan fungsional	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	20 orang	60 orang	61.818.000	-	-	-	-	20 orang	20.000.000	20 orang	20.600.000	20 orang	21.218.000	-	-	-	-	30 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
3, 9	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang informasi jabatan Fungsional	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	1 kegiatan	3 Kegiatan	30.909.000	-	-	-	-	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	10.300.000	1 kegiatan	10.609.000	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-
3, 10	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Fungsional ASN sesuai dengan kompeten sinya	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebanan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK	1320 SK	216.363.000	-	-	-	-	440 SK	70.000.000	440 SK	72.100.000	440 SK	74.263.000	-	-	-	-	2440 SK	6.769.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	9,67	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
3.1.1	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/P AK	40 DUP AK/P AK	120 DUP AK/PAK	154.545.000	-	-	-	-	40 DUP AK/PAK	50.000.000	40 DUP AK/PAK	51.500.000	40 DUP AK/PAK	53.045.000	-	-	-	-	40 DUP AK/PAK	5.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300%	1065	-	-	-	-	-
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Karir jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan Karir jabatan Fungsional	2 Dokumen	6 Dokumen	30.909.000	-	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.609.000	-	-	-	-	2 Dokumen	9.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300%	9930	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	97,5	1.437.268.500	120	-	-	-	-	118	465.000.000	118	478.950.000	120	493.318.500	-	-	-	-	120	44.861.025	-	-	-	-	-	-	-	-	300%	9,65	-	-	-	-	-
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Paraturan	9 Peraturan	30.909.000	-	-	-	-	3 Paraturan	10.000.000	3 Paraturan	10.300.000	3 Paraturan	10.609.000	-	-	-	-	3 Peraturan	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300%	3,00	-	-	-	-	-
4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ASN	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik	12.893 pegawai	12.893 pegawai	618.180.000	-	-	-	-	12.893 pegawai	200.000.000	12.893 pegawai	206.000.000	12.893 pegawai	212.180.000	-	-	-	-	12.893 pegawai	23.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300%	1153	-	-	-	-	-
4.3	Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	46.363.500	-	-	-	-	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.450.000	12 Dokumen	15.913.500	-	-	-	-	4 Dokumen	330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	300%	2,20	-	-	-	-	-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan (2018)	Target Akhir RENSTRA OPD pada Tahun 2023	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun										Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Tingkat Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun										Unit Penanggung jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17=12/7*100%		18=13/8*100%		19-14/9*100%		20=15/10*100%		21=16/11*100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.4	Meningkatnya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	24 Orang	72 Orang	30.909.000	-	-	-	-	24 Orang	10.000.000	24 Orang	10.300.000	24 Orang	10.609.000	-	-	-	-	24 Orang	12.057.625	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	120,58	-	-	-	-	
4.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	200 Orang	600 orang	154.545.000	-	-	-	-	200 Orang	50.000.000	200 Orang	51.500.000	200 Orang	53.045.000	-	-	-	-	200 orang	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3,50	-	-	-	-	
4.6	Meningkatnya Kualitas Evaluasi pelaksanaan Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	1 dokumen	3 Dokumen	92.727.000	-	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.900.000	1 dokumen	31.827.000	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	0,00	-	-	-	-	
4.7	Meningkatnya Disiplin ASN	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	46 OPD	46 OPD	309.090.000	-	-	-	-	46 OPD	100.000.000	46 OPD	103.000.000	46 OPD	106.090.000	-	-	-	-	46 OPD	3.418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	3,42	-	-	-	-	
4.8	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	30 SK	90 SK	30.909.000	-	-	-	-	30 SK	10.000.000	30 SK	10.300.000	30 SK	10.609.000	-	-	-	-	30 SK	2.445.400	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	24,45	-	-	-	-	
4.9	Meningkatnya kualitas Mediasi Perceraian Pegawai	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	20 SK	60 SK	30.909.000	-	-	-	-	20 SK	10.000.000	20 SK	10.300.000	20 SK	10.609.000	-	-	-	-	30 SK	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	7,50	-	-	-	-	
4.10	Meningkatnya Evaluasi Disiplin ASN	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN	12 Dokumen	36 Dokumen	92.727.000	-	-	-	-	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.900.000	12 Dokumen	31.827.000	-	-	-	-	12 Dokumen	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	2,50	-	-	-	-	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi dalam rangka percepatan pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi untuk periode RPJMD 2019-2023 maka Pemerintah Provinsi NTB merumuskan sasaran, yaitu dengan meningkatkan Profesionalisme ASN melalui strategi (1) Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit dan, (2) Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional.

Strategi Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit diatas diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan Provinsi NTB yakni dengan:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan;
2. Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi ASN sesuai Kompetensinya;
3. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin;
4. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi

Dari strategi-strategi diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur, diantaranya dengan penerapan layanan E-Government dengan maksud memberikan pelayanan kepada stakeholder dengan tujuan stakeholder dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Selain itu BKD Provinsi NTB mengembangkan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang disebut SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu), dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan user, operator bahkan ASN itu sendiri dalam memanfaatkan, mengolah, dan mengelola data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN.

Disamping itu dikembangkan juga sistem aplikasi e-SIPJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN) merupakan sistem aplikasi yang bertujuan untuk membantu dalam penilaian kinerja secara individu. E-sipja ini nantinya selain dapat mengukur tingkat kinerja masing-masing ASN juga terintegrasi dengan sistem kehadiran berbasis online sehingga dapat menjadi alat untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat disiplin ASN. Lebih lanjut, e-SIPJA juga akan terintegrasi dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, sehingga diharapkan kesejahteraan Pegawai dapat diwujudkan.

Keinginan yang diiringi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh menghantarkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB memperoleh keberhasilan-keberhasilan di bidang kepegawian diantaranya :

1. Penerima BKN Award “terbaik V Implementasi Assesment Center Pemerintah Provinsi” Tahun 2016.
2. Penerima BKN Award “Pengelola Kepegawian Terbaik Tingkat Provinsi” Tahun 2017
3. Penerima KPK Award “ Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan L
4. HKPN terbaik” Tahun 2017

Dengan beberapa prestasi-prestasi diatas diharapkan Badan Kepegawaian Dearah Provinsi NTB dapat terus meningkatkan kinerja pelayanannya pada periode Renstra 2019-2023 sehingga mampu mencapai visi Daerah NTB gemilang. Berikut kami sajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Tabel.2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pada
Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Nusa Tenggara Barat

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainn ya	Target Renstra Perangkat Daerah tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sangat Baik	100 %		-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	1	1	1
2	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Sangat Baik	100 %		-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	1	1	1
3	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sangat baik	100 %		-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	1	1	1
4	Nilai LKJIP OPD	Baik	B		-	-	B	BB	BB	-	-	B	BB	BB	-	-	1	1	1
5	Cakupan Manajemen Aset	Sangat Baik	100 %		-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	1	1	1
6	Indeks Dimensi Kualifikasi Pendidikan ASN, Disiplin, Kinerja	Baik	44%		-	-	0	0	42 %	-	-	0	0	42 %	-	-	0	0	1
7	Persentase ASN yang Patuh LHKPN	Tepat Waktu	100 %		-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	-	-	1	1	1

Untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan capaian tujuan organisasi, maka Badan kepegawaian Daerah pada tahun 2019 capaian kinerja berada pada nilai 238 atau berada pada kategori II dengan sebutan Kurang. Namun untuk pencapaian tahun 2020 capaian kinerja berada pada nilai 279 atau berada pada kategori II dengan sebutan Baik. Diharapkan pada akhir tahun Renstra yaitu tahun 2023, Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dapat mencapai kategori IV dengan sebutan Sangat baik.

Selanjutnya untuk dapat melihat rasio antara realisasi dan anggaran maka dapat dilihat melalui perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah, sekaligus mampu melihat pertumbuhan anggaran dan realisasinya dalam rangka melihat tren pertumbuhan anggaran sehingga mampu menyusun pagu indikatif didalam perencanaan penganggaran pada periode yang akan datang. Berikut kami sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel.2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB
Tahun 2017 s.d. 2020 (triwulan II)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020 s.d. trw II	2021	2017	2018	2019	2020 s.d. trw II	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pelayanan administrasi perkantoran	4,150,000,600	3,545,740,500	2,395,697,200	1,283,042,400	-	4,034,326,725	3,494,674,696	2,133,884,299	748,771,776	-	0.97	0.99	0.89	0.58	-	(0.51)	(0.21)
Prog. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	576,620,000	3,195,500,000	3,203,278,000	487,456,819	-	532,154,413	2,998,744,414	3,190,691,850	399,716,816	-	0.92	0.94	1.00	0.82	-	(1.58)	(0.05)
Prog. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	370,885,700	342,778,200	34,690,700	850,000	-	320,580,650	321,386,300	6,373,500	850,000	-	0.86	0.94	0.18	1.00	-	(16.26)	(1.07)
Prog. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	132,502,500	158,438,400	199,555,000	183,899,100	-	117,297,500	157,509,775	197,125,125	72,380,000	-	0.89	0.99	0.99	0.39	-	0.09	(0.47)
Prog. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	26,200,000	29,253,000	23,120,000	40,900,000	-	25,800,000	29,122,900	22,971,000	30,200,000	-	0.98	1.00	0.99	0.74	-	0.09	(0.11)
Prog. Peningkatan kualitas kelembagaan/program peningkatan transparansi penyelenggara negara	204,800,000	139,926,000	250,316,000	206,777,200	-	196,079,475	139,471,000	212,757,875	81,502,200	-	0.96	1.00	0.85	0.39	-	(0.08)	(0.43)
Prog. Pembinaan dan pengembangan aparatur	3,209,934,100	2,619,760,700	4,425,732,100	2,584,947,739	-	2,116,265,354	2,254,667,600	3,809,519,380	1,325,748,506	-	0.66	0.86	0.86	0.51	-	(0.18)	(0.15)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada 2018 dan 2019 memperlihatkan masih sangat sedikit kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang menerapkan manajemen sumber daya manusia (SDM) dengan baik. Area perubahan yang berkaitan dengan mentalitas aparatur sipil negara (ASN) malah tidak terlihat program dan gaungnya. Kapabilitas dan integritas ASN pun masih banyak dipertanyakan orang.

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan penunjang di bidang kepegawaian, masalah-masalah dan isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Belum berdasar analisis rencana kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta belum memiliki rencana kebutuhan pegawai jangka menengah 5 (tahun);
2. Prasangka Pengadaan CPNS/PPPK berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme masih terasa didalam masyarakat;
3. Pembinaan dan pengembangan karir belum seutuhnya menerapkan *Merit System*;
4. Penempatan belum berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
5. Penilaian kinerja belum dijadikan acuan dalam proses pengembangan karir ASN;
6. Masih adanya pelanggaran Disiplin dan Kode Etik ASN;
7. Sistem Informasi Kepegawaian belum terintegrasi dengan Sistem Penilaian Kinerja dan Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses pembangunan dan pelayanan di bidang kepegawaian ditopang oleh 2 (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah.

Didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan untuk Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, diantaranya :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 6.2.

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB (berdasarkan permendagri 90/2019)**

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATA N (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERE NCAN AAN	TARGET												UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJA WAB	LO KA SI		
				2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)		
A	Meningkatnya Layanan Pemerintahan Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah						27.71 0.610 .357		28.12 3.928 .668		28.96 1.646 .528		84.796 .185.5 52,45	Kepala BKD Prov. NTB	Pr ov. NT B	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	BB	-	-	-	-	B	190.0 00.00 0	B	195.7 00.00 0	B	201.5 71.00 0	B	587.27 1.000	Sekretari s	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya Kualitas Perencana an Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	15.00 0.000	1 Dok ume n	15.45 0.000	1 Dok ume n	15.91 3.500	3 Dok ume n	46.363 .500	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya Kualitas Dokumen RKA- SKPD	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	15.00 0.000	1 Dok ume n	15.45 0.000	1 Dok ume n	15.91 3.500	3 Dok ume n	46.363 .500	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya Kualitas Penyusun an Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	15.00 0.000	1 Dok ume n	15.45 0.000	1 Dok ume n	15.91 3.500	3 Dok ume n	46.363 .500	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya Kualitas Penyusun an DPA- SKPD	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	15.00 0.000	1 Dok ume n	15.45 0.000	1 Dok ume n	15.91 3.500	3 Dok ume n	46.363 .500	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya KualitasPe nyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKOP dan Perubahan DPA- SKPD	1 DOKu men	-	-	-	-	1 DOK ume n	15.00 0.000	1 DOK ume n	15.45 0.000	1 DOK ume n	15.91 3.500	3 Dok ume n	46.363 .500	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya Kualitas Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan RKOP dan RENJA OPD	4 Doku men	-	-	-	-	4 Dok ume n	15.00 0.000	4 Dok ume n	15.45 0.000	4 Dok ume n	15.91 3.500	12 Dok ume n	46.363 .500	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
1	Meningkat nya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	100.0 00.00 0	1 Dok ume n	103.0 00.00 0	1 Dok ume n	106.0 90.00 0	3 Dok ume n	309.09 0.000	Kasubag. Program dan Pelapora n	Pr ov. NT B
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKD	BB	-	-	-	-	B	24.32 9.035 .524	B	25.05 8.906 .590	B	25.81 0.673 .787	B	75.198 .615.9 01	Sekretari s	Pr ov. NT B
2	Meningkat nya Ketepatan Waktu Pembayaran an Gaji dan Tunjangan	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan nya	90 orang	-	-	-	-	90 oran g	24.14 9.035 .524	90 oran g	24.87 3.506 .590	90 oran g	25.61 9.711 .787	90 oran g	74.642 .253.9 01	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET										UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB		LOKASI		
						2019		2020		2021		2022		2023					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				TARGET	Rp.
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)	
2,2	Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	2,2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD	150 Dokumen	-	-	-	-	150 Dokumen	10.000.000	150 Dokumen	10.300.000	150 Dokumen	10.609.000	450 Dokumen	30.909.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
2,3	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	2,3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPTB/GU	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	120.000.000	12 Dokumen	123.600.000	12 Dokumen	127.308.000	36 Dokumen	370.908.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
2,4	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Keuangan	2,4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.300.000	4 Dokumen	10.609.000	12 Dokumen	30.909.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
2,5	Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2,5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	3 Dokumen	30.909.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
2,6	Meningkatnya Kecepatan/Ketepatan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	3 Dokumen	30.909.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
2,7	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	2,7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	10.300.000	12 Dokumen	10.609.000	36 Dokumen	30.909.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
2,8	Meningkatnya Akurasi Pelaporan Realisasi Anggaran	2,8	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.300.000	1 Dokumen	10.609.000	3 Dokumen	30.909.000	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB	
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dengan Kualitas Baik	90%	-	-	-	-	90%	55.000.000	90%	56.650.000	90%	58.349.500	90%	169.999.500	Sekretaris	Prov. NTB	
3,1	Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Barang Milik Daerah	3,1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	3 Dokumen	15.454.500	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB	
3,2	Meningkatnya Pengamanan BMD	3,2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Aset	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	3 Dokumen	15.454.500	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB	
3,3	Meningkatnya Kualitas Penilaian BMD	3,3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Aset yang dinilai	5 item	-	-	-	-	5 item	5.000.000	5 item	5.150.000	5 item	5.304.500	15 Item	15.454.500	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB	
3,4	Meningkatnya Kualitas, Pengawasan dan Pengendalian BMD	3,4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Daftar Inventaris Barang	12 Daftar	-	-	-	-	12 Daftar	5.000.000	12 Daftar	5.150.000	12 Daftar	5.304.500	36 Daftar	15.454.500	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB	
3,5	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi dan Laporan RMD.	3,5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset	2 Berita Acara	-	-	-	-	2 Berita Acara	5.000.000	2 Berita Acara	5.150.000	2 Berita Acara	5.304.500	6 Berita Acara	15.454.500	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB	

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATA N (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERE NCAN AAN	TARGET												UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJA WAB	LO KA SI		
				2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH					
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)		
3 , 6	Meningkat nya Kualitas Penatausa haan BMD	3 , 6	Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausa haan BMD	12 Doku men	-	-	-	-	12 Dok ume n	25.00 0.000	12 Dok ume n	25.75 0.000	12 Dok ume n	26.52 2.500	36 Dok ume n	77.272 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
3 , 7	Meningkat nya Pemanfaat an BMD	3 , 7	Pemanfaata n Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset yang dapat dimanfaatk an	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	5.000 .000	1 Dok ume n	5.150 .000	1 Dok ume n	5.304 .500	3 Dok ume n	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
4	Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah.	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentas e Realisasi Pendapat an Daerah	90%	-	-	-	-	90%	35.00 0.000	90%	36.05 0.000	90%	37.13 1.500	90%	108.18 1.500	Sekretari s	Pr ov. NT B
4 , 1	Meningkat nya Kualitas Perencana an Pengelola an Retribusi Daerah	4 , 1	Perencanaa n Pengelolaan n Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Retribusi Daerah	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	10.00 0.000	1 Dok ume n	10.30 0.000	1 Dok ume n	10.60 9.000	3 doku men	30.909 .000	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
4 , 2	Meningkat nya Kualitas Analisis serta Kebijakan Retribusi Daerah	4 , 2	Analisa dan Pengemban gan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Kerjasama Potensi Retribusi Daerah	2 Kegiat an	-	-	-	-	2 Kegi atan	-	2 Kegi atan	-	2 Kegi atan	-	6 kegi atan	-	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
4 , 3	Meningkat nya Sosialisasi Potensi Retribusi Daerah	4 , 3	Penyuluhan dan Penyebarlua san Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi potensi Retribusi Daerah	1 kegiat an	-	-	-	-	1 kegi atan	-	1 kegi atan	-	1 kegi atan	-	1 kegi atan	-	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
4 , 4	Meningkat nya Kualitas data objek retribusi daerah	4 , 4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek retribusi Daerah	10 objek	-	-	-	-	10 obje k	-	10 obje k	-	10 obje k	-	10 obje k	-	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
4 , 5	Meningkat nya jumlah potensi retribusi daerah	4 , 5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah potensi retribusi darah	10 dokum en	-	-	-	-	10 doku men	25.00 0.000	10 doku men	25.75 0.000	10 doku men	26.52 2.500	30 doku men	77.272 .500	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
4 , 6	Meningkat nya ketepatan wajib retribusi daerah	4 , 6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah pentapan wajib retribusi daerah	10 dokum en	-	-	-	-	10 doku men	-	10 doku men	-	10 doku men	-	30 doku men	-	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
4 , 7	Mningkatn ya Laporan retribusi daerah	4 , 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokuen laporan retribusi daerah	1 dokum en%	-	-	-	-	1 doku men	-	1 doku men	-	1 doku men	-	3 doku men	-	Kasubag. Keuanga n	Pr ov. NT B
5	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentas e Kepuasan Layanan	90%	-	-	-	-	90%	120.0 00.00 0	90%	123.6 00.00 0	90%	127.3 08.00 0	90%	370.90 8.000	Sekretari s	Pr ov. NT B
5 , 1	Meningkat nya Ketersedia an Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 , 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	5.000 .000	2 jenis	5.150 .000	2 jenis	5.304 .500	2 jenis	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 2	Meningkat nya Keseraga man Atribut dan Pakaian Dinas	5 , 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapn a	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	3 item	-	-	-	-	3 item	30.00 0.000	3 item	30.90 0.000	3 item	31.82 7.000	3 item	92.727 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATA N (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERE NCAN AAN	TARGET												UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJA WAB	LO KA SI	
				2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PERANGKAT DAERAH				
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)	
5 , 3	Meningkat nya Kualitas Pendataan dan Pengelola an Administrasi Kepegawa ian	5 , 3Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Pengajaan Pengelola an Administra si Kepegawa ian	1 Doku men	-	-	-	-	1 Dok ume n	5.000 .000	1 Dok ume n	5.150 .000	1 Dok ume n	5.304 .500	1 Dok ume n	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 4	Meningkat nya Koordinasi dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegawa ian	5 , 4Koordinasi dan Pelaksanaaa n Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Kepegawa ian yang turupdate dalam sistem Kepegawa ian	90 dokum en	-	-	-	-	90 doku men	5.000 .000	90 doku men	5.150 .000	90 doku men	5.304 .500	90 doku men	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 5	Mningkatn ya ketepatan dan Kecapatan pelaporan kinerja Pegawai	5 , 5Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai	90 Lapo ran	-	-	-	-	90 Lapo ran	5.000 .000	90 Lapo ran	5.150 .000	90 Lapo ran	5.304 .500	90 Lapo ran	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 6	Meningkat nya Apresiasi Pegawai Pensiun	5 , 6Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah apresiasi pegawai pensiun	2 Pegaw ai	-	-	-	-	2 Peg awai	-	2 Peg awai	-	2 Peg awai	-	2 Peg awai	-	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 7	Meningkat nya Kecepatan dan Pelayanan terhadap pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	5 , 7Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanak an Tugas	jumlah pelayanan pemulana gan pegawai yang meninggal dalam melaksa nkan tugas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 8	Meningkat nya Apresiasi Pegawai yang Pindah Tugas	5 , 8Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas	10 pegaw ai	-	-	-	-	10 pega wai	10.00 0.000	10 pega wai	10.30 0.000	10 pega wai	10.60 9.000	30 Peg awai	30.909 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 9	Meningkat nya Pengebangan kapasitas Pegawai melalui DIKLAT	5 , 9Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksa nkan DIKLAT	20 pegaw ai	-	-	-	-	20 pega wai	50.00 0.000	20 pega wai	51.50 0.000	20 pega wai	53.04 5.000	60 Peg awai	154.54 5.000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 10	Meningkat nya pemaham an terhadap Peraturan perundang -undangan	5 , 10Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan	jumlah peraturan perundang -undangan yang disosialisa sikan	4 Aturan	-	-	-	-	4 Atur an	5.000 .000	4 Atur an	5.150 .000	4 Atur an	5.304 .500	12 Atur an	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
5 , 11	Meningkat nya kemampu an teknis pelaksanaan an peraturan perundang -undangan	5 , 11Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang -Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang -undangan	4 aturan	-	-	-	-	4 atura n	5.000 .000	4 atura n	5.150 .000	4 atura n	5.304 .500	12 Atur an	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentas e Pemenuh an Logistik Kantor	100%	-	-	-	-	100 %	1.230 .000. 000	100 %	1.266 .900. 000	100 %	1.304 .907. 000	100 %	3.801. 807.00 0	Sekretari s	Pr ov. NT B
6 , 1	Meningkat nya Ketersedia an Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor	6 , 1Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/pene rangan	20 jenis	-	-	-	-	20 jenis	30.00 0.000	20 jenis	30.90 0.000	20 jenis	31.82 7.000	40 Jeni s	92.727 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 , 2	Meningkat nya Ketersedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	6 , 2Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	jumlah peralatan dan perlengka n kantor yang tersedia	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	-	6 jenis	-	6 jenis	-	18 Jeni s	-	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATA N (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJAW AB	LO KA SI			
				2019		2020		2021		2022		2023							
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)		
6 . 3	Mningkatn ya Ketersidia n Peralatan Rumah Tangga	6 . 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	-	-	-	-	3 jenis	20.00 0.000	3 jenis	20.60 0.000	3 jenis	21.21 8.000	9 Jeni s	61.818 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 4	Meningkat nya Ketersedia an Bahan Logistik Kantor	6 . 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Kantor yang tersedia	12 bulan	-	-	-	-	12 bula n	350.0 00.00 0	12 bula n	360.5 00.00 0	12 bula n	371.3 15.00 0	36 Bula n	1.081. 815.00 0	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 5	Meningkat nya Ketersedia an Barang Cetakan dan Penggandaan	6 . 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	10.00 0.000	5 jenis	10.30 0.000	5 jenis	10.60 9.000	15 jenis	30.909 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 6	Meningkat nya Ketersedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 . 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	30.00 0.000	5 jenis	30.90 0.000	5 jenis	31.82 7.000	15 Jeni s	92.727 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 7	Meningkat nya Ketersedia an Bahan/Mat erial	6 . 7	Penyediaan Bahan/Materi al	Jumlah bahan/mat erial yang tersedia	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	20.00 0.000	2 jenis	20.60 0.000	2 jenis	21.21 8.000	6 Jeni s	61.818 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 8	Meningkat nya Fasilitas Kunjungan Tamu	6 . 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	80 kali	-	-	-	-	80 kali	60.00 0.000	80 kali	61.80 0.000	80 kali	63.65 4.000	240 kali	185.45 4.000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 9	Meningkat nya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 . 9	Penyelengg aaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kali	-	-	-	-	100 kali	600.0 00.00 0	100 kali	618.0 00.00 0	100 kali	636.5 40.00 0	300 Kali	1.854. 540.00 0	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 10	Meningkat nya Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	6 . 10	Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata	7 bidang	-	-	-	-	7 bida ng	100.0 00.00 0	7 bida ng	103.0 00.00 0	7 bida ng	106.0 90.00 0	7 Bida ng	309.09 0.000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
6 . 11	Meningkat nya Pelaksana an Sistem Pemerinta n Berbasis Elektronik pada SKPD	6 . 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah fasilitasi e-governme nt	3 aplika si	-	-	-	-	3 aplik asi	10.00 0.000	3 aplik asi	10.30 0.000	3 aplik asi	10.60 9.000	3 Aplik asi	30.909 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
7	Meningkatnya Ketersediaan barang Milik Daerah	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas e Realisasi Capaian Fisik RKBMD	20%	-	-	-	-	20%	600.0 00.00 0	20%	200.0 00.00 0	20%	200.0 00.00 0	20%	1.000. 000.00 0	Sekretari s	Pr ov. NT B
7 . 1	Meningkat nya Ketersedia an kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 . 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia	2 unit	-	-	-	-	2 unit	-	-	-	-	-	2 unit	-	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
7 . 2	Meningkat nya Ketersedia an Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	7 . 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang tersedia	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit	-	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI	
					2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
					TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)
7.3	Meningkatnya ketersediaan Mebel	7.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	40 unit	-	-	-	-	40 unit	200.000.000	-	-	-	-	40 unit	200.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7.4	Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan Mesin	7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	4 paket	-	-	-	-	4 paket	200.000.000	4 paket	200.000.000	4 paket	200.000.000	12 paket	600.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7.5	Meningkatnya Ketersediaan Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang Tersedia	2 paket	-	-	-	-	2 paket	-	-	-	-	-	2 paket	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7.6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	7.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Tersedia	1 paket	-	-	-	-	1 paket	200.000.000	-	-	-	-	2 paket	200.000.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7.7	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	7.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket	-	-	-	-	1 paket	-	-	-	-	-	1 paket	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8	Meningkatnya Ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemda	100%	-	-	-	-	100%	721.574.833	100%	743.222.078	100%	765.518.740	100%	2.230.315.651	Sekretaris	Prov. NTB
8.1	Meningkatnya Ketersediaan jasa Surat menyurat	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat yang tersedia	6000 surat	-	-	-	-	6000 surat	5.000.000	6000 surat	5.150.000	6000 surat	5.304.500	18000 surat	15.454.500	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8.2	Meningkatnya Ketersediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	276.574.833	12 bulan	284.872.077,99	12 bulan	293.418.240	36 bulan	854.865.151	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8.3	Meningkatnya Ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	20.000.000	2 jenis	20.600.000	2 jenis	21.218.000	6 jenis	61.818.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8.4	Meningkatnya Ketersediaan pelayanan Umum Kantor	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	16 orang	-	-	-	-	14 orang	420.000.000	16 orang	432.600.000	16 orang	445.578.000	48 orang	1.298.178.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9	Meningkatnya Pemeliharaan barang Milik Daerah	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	90%	-	-	-	-	90%	430.000.000	90%	442.900.000	90%	456.187.000	90%	1.329.087.000	Sekretaris	Prov. NTB
9.1	Meningkatnya Ketersediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara	37 unit	-	-	-	-	37 unit	200.000.000	37 unit	206.000.000	37 unit	212.180.000	37 unit	618.180.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATA N (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN	TARGET												UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJA WAB	LO KA SI	
				2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
9 , 2	Meningkat nya ketersediaan Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang terpelihara	2 unit	-	-	-	-	2 unit	15.00 0.000	2 unit	15.45 0.000	2 unit	15.91 3.500	2 unit	46.363 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
9 , 3	Meningkat nya masa pakai Mebel	9 , 3 Pemeliharaa n Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	2 unit	-	-	-	-	2 unit	5.000 .000	2 unit	5.150 .000	2 unit	5.304 .500	2 unit	15.454 .500	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
9 , 4	Meningkat nya pemelihar aan Peralatan dan Mesin Lainnya	9 , 4 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	37 unit	-	-	-	-	37 unit	10.00 0.000	37 unit	10.30 0.000	37 unit	10.60 9.000	37 unit	30.909 .000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
9 , 5	Meningkay nya Pemelihar aan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9 , 5 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara /terehabilit asi	1 gedun g	-	-	-	-	1 gedu ng	100.0 00.00 0	1 gedu ng	103.0 00.00 0	1 gedu ng	106.0 90.00 0	1 gedu ng	309.09 0.000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
9 , 6	Meningkat nya Pemelihar aan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 , 6 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan praarana gedung Kantor yang terpelihara /terehabilit asi	1 tahun	-	-	-	-	1 tahu n	50.00 0.000	1 tahu n	51.50 0.000	1 tahu n	53.04 5.000	3 tahu n	154.54 5.000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
9 , 7	Meningkat nya Pemelihar aan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 , 7 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukun g gedung Kantor yang terpelihara /terehabilit asi	1 tahun	-	-	-	-	1 tahu n	50.00 0.000	1 tahu n	51.50 0.000	1 tahu n	53.04 5.000	3 tahu n	154.54 5.000	Kasubag. Umum dan Kepegaw aian	Pr ov. NT B
B	Meningkatnya Kualitas Sistem Merit	B Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapa n Sistem Merit	237,5					315, 0	3.215 .963. 967	347, 5	3.312 .442. 886	373, 0	3.411 .816. 173	373, 0	9.940. 223.02 5,60	Kepala BKD Prov. NTB	Pr ov. NT B
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi	1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencana an Kebutuha n, Pengadaa n dan Sistem Informasi	81	-	-	-	-	96	1.110 .963. 967	99	1.144 .292. 886	102	1.178 .621. 673	102	3.433. 878.52 5,60	Kabid. Pengada an, Pemberh entian dan Informas i	Pr ov. NT B
1 , 1	Meningkat nya Kualitas Kebijakan Pengadaa n ASN	1 , 1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaa n ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PP PK	1500 Fomas i	-	-	-	-	1500 Fom asi	10.00 0.000	1500 Fom asi	10.30 0.000	1500 Fom asi	10.60 9.000	4500 form asi	30.909 .000,0 0	Kasubid. Pengada an pegawai	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERENCANA AN	TARGET										UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJA WAB	LO KA SI				
				2019		2020		2021		2022		2023				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.			Targ et	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
1 . 2	Meningkat nya Kualitas perencanaan Kebutuhan PNS/PPP K	1 . 2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PP PK	400 formas i	-	-	-	-	400 form asi	30.00 0.000	400 form asi	30.90 0.000	400 form asi	31.82 7.000	1200 form asi	92.727 .000,0 0	Kasubid. Pengada an pegawai	Pr ov. NT B
1 . 3	Meningkat nya Kualitas Pengadaa n Pegawai	1 . 3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3 K terseleksi	400 orang	-	-	-	-	400 oran g	500.0 00.00 0	400 oran g	515.0 00.00 0	400 oran g	530.4 50.00 0	1200 oran g	1.545. 450.00 0,00	Kasubid. Pengada an pegawai	Pr ov. NT B
1 . 4	Mningkatn ya Transpara nsi Pengadaa n ASN	1 . 4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyeleng garaan Seleksi CPNS/PP PK	10 kab/K ota	-	-	-	-	10 kab/ Kota	50.00 0.000	10 kab/ Kota	51.50 0.000	10 kab/ Kota	53.04 5.000	10 Kab/ kota	154.54 5.000, 00	Kasubid. Pengada an pegawai	Pr ov. NT B
1 . 5	Meningkat nya Kualitas Perumusa n bahan Kebijakan Pemberhe ntian ASN	1 . 5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhenti an ASN	jumlah koordinasi perumusa n bahan kebijakan pemberhe ntian ASN	1 kegiat an	-	-	-	-	1 kegi atan	10.00 0.000	1 kegi atan	10.30 0.000	1 kegi atan	10.60 9.000	3 kegi atan	30.909 .000,0 0	Kasubid. Pengang katan dan Pemberh entian Pegawai	Pr ov. NT B
1 . 6	Meningkat nya Ketepatan Waktu Pensiun ASN	1 . 6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhenti an	Jumlah keputusan pemberhe ntian PNS dan PTT	245 SK	-	-	-	-	245 SK	80.00 0.000	245 SK	82.40 0.000	245 SK	84.87 2.000	735 SK	247.27 2.000, 00	Kasubid. Pengang katan dan Pemberh entian Pegawai	Pr ov. NT B
1 . 7	Meningkat nya Kualitas Evaluasi Pemberhe ntian ASN	1 . 7	Evaluasi Pemberhenti an ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	1 dokum en	-	-	-	-	1 doku men	10.00 0.000	1 doku men	10.30 0.000	1 doku men	10.60 9.000	3 Dok ume n	30.909 .000,0 0	Kasubid. Pengang katan dan Pemberh entian Pegawai	Pr ov. NT B
1 . 8	Meningkat nya Kesejahter aan ASN	1 . 8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	4 kegiat an	-	-	-	-	2 kegi atan	140.0 00.00 0	4 kegi atan	144.2 00.00 0	4 kegi atan	148.5 26.00 0	12 Kegi atan	432.72 6.000, 00	Kasubid. Pendidik an, Cuti dan Kesra	Pr ov. NT B
1 . 9	Meningkat nya kualitas database pengelolaa n data dan informasi ASN	1 . 9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelola an Data dan Informasi ASN	1 Aplika si	-	-	-	-	1 Aplik asi	50.00 0.000	1 Aplik asi	51.50 0.000	1 Aplik asi	53.04 5.000	3 Aspli kasi	154.54 5.000, 00	Kasubid. Pengolah an Data dan Sistem Informasi Kepegaw aian	Pr ov. NT B
1 . 10	Meningkat nya Pengelola an Sistem Informasi Kepegawi an	1 . 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/S IMADU	13.950 Pegaw ai	-	-	-	-	14.1 43 Pga wai	90.96 3.967	14.1 43 Pga wai	93.69 2.886	14.1 43 Pga wai	96.50 3.673	14.1 43 Pga wai	281.16 0.526	Kasubid. Pengolah an Data dan Sistem Informasi Kepegaw aian	Pr ov. NT B
1 . 11	Meningkat nya ketersedia an . Dokumen Kepegawa ian secara Elektronik	1 . 11	Pengelolaan Data Kepegawaia n	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi	13.950 Pegaw ai	-	-	-	-	13.9 50 Peg awai	70.00 0.000	13.9 50 Peg awai	72.10 0.000	13.9 50 Peg awai	74.26 3.000	13.9 50 Peg awai	216.36 3.000, 00	Kasubid. Dokumen tasi dan tata Naskah kepegaw aian	Pr ov. NT B
1 . 12	Meningkat nya evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawa ian	1 . 12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaia n	Jumlah Data ASN yang telah terdokume ntasi secara Elektronik	13.950 Pegaw ai	-	-	-	-	13.9 50 Peg awai	70.00 0.000	13.9 50 Peg awai	72.10 0.000	13.9 50 Peg awai	74.26 3.000	13.9 50 Peg awai	216.36 3.000, 00	Kasubid. Dokumen tasi dan tata Naskah kepegaw aian	Pr ov. NT B
2	Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	2	Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	20	-	-	-	-	32,5	820.0 00.00 0	32,5	844.6 00.00 0	32,5	869.9 38.00 0	32,5	2.534. 538.00 0,00	Kabid Promosi dan Mutasi ASN	Pr ov. NT B
2 . 1	Meningkat nya Ketepatan Penempat an PNS/PTT	2 . 1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindah an PNS/PTT	230 SK	-	-	-	-	230 SK	100.0 00.00 0	230 SK	103.0 00.00 0	230 SK	106.0 90.00 0	690 SK	309.09 0.000, 00	Kasubid. Perpinda han dan Status kepegaw aian	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN /SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA TUJUAN, SASARA N, PROGRA M (outcome) DAN KEGIATA N (output)	DATA CAPA IAN PADA AWAL TAHUN PERE NCAN AAN	TARGET												UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNGJA WAB	LO KA SI
				2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
				Ta rg et	R p .	Ta rg et	R p .	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
2 Meningkat nya Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat ASN	2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK	-	-	-	-	3000 SK	320.0 00.00 0	3000 SK	329.6 00.00 0	3000 SK	339.4 88.00 0	9000 SK	989.08 8.000, 00	Kasubid. Kejangk atan dan Penggaji an Pegawai	Pr ov. NT B
2 Meningkat nya Kualitas Pengemba ngan Karir Jabatan Struktural ASN sesuai dengan kompetens inya	2 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempat an dan pembebas an dalam Jab. Struktural	400 SK	-	-	-	-	400 SK	400.0 00.00 0	330 SK	412.0 00.00 0	330 SK	424.3 60.00 0	990 SK	1.236. 360.00 0,00	Kasubid. Pengemb angan Karir JPT dan JA	Pr ov. NT B
3 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	3 Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindun gan dan pelayanan	39	-	-	-	-	69	820.0 00.00 0	98,5	844.6 00.00 0	118, 5	869.9 38.00 0	119	2.534. 538.00 0,00	Kabid Pengem bangan Kompet eksi ASN dan UPPK	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya Produktifit as Kinerja ASN melalui Konseling	3 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling	30 pegaw ai	-	-	-	-	30 pegaw ai	20.00 0.000	30 pegaw ai	20.60 0.000	30 pegaw ai	21.21 8.000	90 Peg awai	61.818 .000,0 0	Kasi Promosi dan Pelayana n	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya Informasi Kompeten si ASN	3 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpataka n Kompeten sinya	400 orang	-	-	-	-	400 oran g	180.0 00.00 0	400 oran g	185.4 00.00 0	400 oran g	190.9 62.00 0	1200 oran g	556.36 2.000, 00	Kasi. Penilaian Kompet eksi	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya kualitas Administra si Diklat dan sertifikasi ASN	3 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomend asi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	100 pegaw ai	-	-	-	-	100 pegaw ai	10.00 0.000	100 pegaw ai	10.30 0.000	100 pegaw ai	10.60 9.000	300 pegaw ai	30.909 .000,0 0	Kasubid. Pemetaa n Kompet eksi	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya Kualifikasi Pendidika n ASN	3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	80 orang	-	-	-	-	80 oran g	300.0 00.00 0	80 oran g	309.0 00.00 0	80 oran g	318.2 70.00 0	240 oran g	927.27 0.000, 00	Kasubid. Pendidik an, Cuti dan Kesra	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya koordinasi dan kerjasama pelaksana n diklat	3 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksana n diklat	10 kerjas ama	-	-	-	-	10 kerja sam a	50.00 0.000	10 kerja sam a	51.50 0.000	10 kerja sam a	53.04 5.000	30 kerja sam a	154.54 5.000, 00	Kasubid. Pemetaa n Kompet eksi	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya Pembinaa n dan Supervisi Pemetaan Kompetensi si ASN	3 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi si ASN	10 Doku men	-	-	-	-	10 Dok ume n	50.00 0.000	10 Dok ume n	51.50 0.000	10 Dok ume n	53.04 5.000	30 Dok uem n	154.54 5.000, 00	Kasi Promosi dan Pelayana n	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya Kualitas Pola Pengemba ngan Karir ASN	3 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta	300 Pegaw ai	-	-	-	-	300 Peg awai	50.00 0.000	300 Peg awai	51.50 0.000	300 Peg awai	53.04 5.000	900 Peg awai	154.54 5.000	Kasubid. Pemetaa n Kompet eksi	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya sertifikasi jabatan fungsional	3 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompeten si	20 orang	-	-	-	-	20 oran g	20.00 0.000	20 oran g	20.60 0.000	20 oran g	21.21 8.000	60 oran g	61.818 .000,0 0	Kasubid. Pengemb angan Karir Jabatan Fungsi onal	Pr ov. NT B
3 Meningkat nya Pemaham an dan Pengetahu an tentang informasi jabatan Fungsional	3 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	1 kegiat an	-	-	-	-	1 kegi atan	10.00 0.000	1 kegi atan	10.30 0.000	1 kegi atan	10.60 9.000	3 Kegi atan	30.909 .000,0 0	Kasubid. Pengemb angan Karir Jabatan Fungsi onal	Pr ov. NT B

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI			
				2019		2020		2021		2022		2023							
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)		
3.1.0	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Fungsional ASN sesuai dengan kompetensinya	3.1.0	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK	-	-	-	-	440 SK	70.000.000	440 SK	72.100.000	440 SK	74.263.000	1320 SK	216.363.000,00	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
3.1.1	Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	3.1.1	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/P AK	40 DUPAK/P AK	-	-	-	-	40 DUPAK/P AK	50.000.000	40 DUPAK/P AK	51.500.000	40 DUPAK/P AK	53.045.000	120 DUPAK/P AK	154.545.000,00	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir jabatan Fungsional	3.1.2	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.609.000	6 Dokumen	30.909.000,00	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	97,5	-	-	-	-	117,5	465.000.000	117,5	478.950.000	120	493.318.500	120	1.437.268.500,00	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Prov. NTB
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Peraturan	-	-	-	-	3 Peraturan	10.000.000	3 Peraturan	10.300.000	3 Peraturan	10.609.000	9 Peraturan	30.909.000,00	Kasubid. Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. NTB
4.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja ASN	4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik	12.893 pegawai	-	-	-	-	12.893 pegawai	200.000.000	12.893 pegawai	206.000.000	12.893 pegawai	212.180.000	12.893 pegawai	618.180.000,00	Kasubid. Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. NTB
4.3	Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Aparatur	4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	15.450.000	12 Dokumen	15.913.500	12 Dokumen	46.363.500,00	Kasubid. Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. NTB
4.4	Meningkatnya Pemberian Penghargaan bagi ASN	4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	24 Orang	-	-	-	-	24 Orang	10.000.000	24 Orang	10.300.000	24 Orang	10.609.000	72 Orang	30.909.000,00	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
4.5	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	4.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	200 Orang	-	-	-	-	200 Orang	50.000.000	200 Orang	51.500.000	200 Orang	53.045.000	600 orang	154.545.000,00	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
4.6	Meningkatnya Kualitas Evaluasi pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4.6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.900.000	1 dokumen	31.827.000	3 Dokumen	92.727.000,00	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
4.7	Meningkatnya Disiplin ASN	4.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	46 OPD	-	-	-	-	46 OPD	100.000.000	46 OPD	103.000.000	46 OPD	106.090.000	46 OPD	309.090.000,00	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB
4.8	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	4.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	30 SK	-	-	-	-	30 SK	10.000.000	30 SK	10.300.000	30 SK	10.609.000	90 SK	30.909.000,00	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
				2019		2020		2021		2022		2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	(12)
4.9 Meningkatkan kualitas Mediasi Perceraian Pegawai	4.9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	20 SK	-	-	-	-	20 SK	10.000.000	20 SK	10.300.000	20 SK	10.609.000	60 SK	30.909.000,00	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB
4.10 Meningkatkan Evaluasi Disiplin ASN	4.10 Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	30.900.000	12 Dokumen	31.827.000	36 Dokumen	92.727.000,00	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB
Jumlah Pagu Anggaran Indikatif				-	-	-	-		30.926.574.324		31.436.371.554		32.373.462.700		94.736.408.578		Prov. NTB

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawian Negara tahun 2020-2024 yang memiliki Visi “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Yang dijabarkan dalam 5 pilar yang menjadi misi Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN,
2. Penyelenggaraan manajemen ASN,
3. Penyimpanan informasi pegawai ASN,
4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.dan
5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN

Dengan tujuan sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang Berkualitas sebagai referensi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial).
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima sebagai sarana Mewujudkan manajemen talenta nasional dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi ASN (SI – ASN) sebagai sarana penerapan sistem merit. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian

secara akurat dan penyusunan talent pool); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (on-line);

4. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. Indikasi tercapainya tujuan ini adalah penyelenggaraan Manajemen ASN yang handal dan dinamis. Lebih jauh dari itu, indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN akan membuat manajemen ASN berjalan sesuai NSPK yang akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan good governance; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien, Dan Akuntabel dalam rangka mewujudkan visi & misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, Opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

Sejalan dengan Visi dan Misi serta Tujuan Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi Pembina urusan penunjang bidang kepegawaian, maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB berusaha menyelaraskan Rencana Strategisnya dengan Rencana Strategis BKN. Benang Merah dari kajian Rencana Strategis BKN adalah pada Periode Renstra 2020-2024 berfokus kepada Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN. Hal ini senada dengan Tujuan yang terdapat didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yakni “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit”. Dengan Penerapan Sistem Merit ini diharapkan akan menjawab beberapa aspek pengelolaan kepegawaian diantaranya”

1. Perencanaan Kebutuhan
2. Pengadaan
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan Mutasi;
5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan serta
8. Sistem Informasi.

Dengan perbaikan pada kedelapan aspek ini diharapkan mampu mendongkrak indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB dan pada akhirnya juga meningkatkan Indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTB.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan visi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Tujuan berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi dan visi Daerah dan diukur dengan indikator tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh unit kerja organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berdasarkan visi dan misi Daerah serta tugas dan fungsi organisasi maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019 – 2023 yaitu :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit	Mewujudkan Majemen ASN yang Meritokrasi	Nilai Sistem Merit	238 Kategori II (kurang)	279 Kategori III (baik)	315 Kategori III (baik)	347.5 Kategori IV (sangat baik)	373 Kategori IV (sangat baik)

4.

dari tabel diatas dapat kita lihat Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit” dengan sasaran “Mewujudkan Majemen ASN yang Meritokrasi”.

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, Misi kedua yaitu “NTB BERSIH DAN MELAYANI” memiliki tujuan yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel dengan indikator Tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, salah satu sasaran dalam Misi kedua yang berkaitan erat dengan fungsi penunjang urusan kepegawaian adalah pada sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya Profesionalisme ASN” dengan indikator sasaran yaitu Indeks Profesionalisme ASN.

Sedangkan didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023, Tujuan Renstra yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit” dengan indikator tujuan yakni “Nilai Sistem Merit” dan “ Indeks Profesionalisme ASN”.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi NTB dengan Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023

Misi Ke-2 RPJMD	Tujuan & Sasaran RPJMD				Tujuan & Sasaran Renstra		
	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Penerapan Manajemen SDM ASN Berbasis Sistem Merit	Mewujudkan Majemen ASN yang Meritokrasi	Nilai Sistem Merit
			Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP			
			Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN			
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik			

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Sedangkan Kegiatan merupakan aktivitas yang terukur dari program yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan haruslah merupakan kegiatan yang esensial dan dapat terukur.

Berikut beberapa Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2021 :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan Tahun 2021 BKD Provinsi NTB

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
1	3		4
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP BKD
	1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
	1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD
	1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan RKDP dan RENJA OPD
	1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai Sakip BKD
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya
	2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD
	2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPTB/GU
	2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan
	2.5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP
	2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran
	2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD dengan Kualitas Baik
	3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD
	3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Aset
	3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Aset yang dinilai
	3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Daftar Inventaris Barang
	3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset
	3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD
	3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset yang dapat dimanfaatkan
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah
	4.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Retribusi Daerah
	4.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Kerjasama Potensi Retribusi Daerah
	4.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi potensi Retribusi Daerah
	4.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek retribusi Daerah
	4.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah potensi retribusi daerah
	4.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah penetapan wajib retribusi daerah
	4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokumen laporan retribusi daerah
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Kepuasan Layanan
	5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai
	5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut
	5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penjagaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
	5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate dalam sistem Kepegawaian

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
1	3		4
	5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai
	5.6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah apresiasi pegawai pensiun
	5.7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	jumlah pelayanan pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas
	5.8	Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas
	5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT
	5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan
	5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Logistik Kantor
	6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
	6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
	6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
	6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Kantor yang tersedia
	6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia
	6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia
	6.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia
	6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi
	6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditata
	6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah fasilitasi e-government
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Realisasi Capaian Fisik RKBMD
	7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia
	7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia
	7.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia
	7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia
	7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang Tersedia
	7.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Tersedia
	7.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda
	8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat-menyurat yang tersedia
	8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang tersedia
	8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
	8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum Kantor yang Tersedia
	8.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik
	8.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
1	3		4
	8.7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara
	8.8	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara
	8.9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara
	8.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara/terehabilitasi
	8.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung Kantor yang terpelihara/terehabilitasi
	8.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang terpelihara/terehabilitasi
B	Program Kepegawaian Daerah		Nilai Penerapan Sistem Merit
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan Sistem Informasi
	1.1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK
	1.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK
	1.3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi
	1.4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK
	1.5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN
	1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT
	1.7	Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN
	1.8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI
	1.9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN
	1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU
	1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi
	1.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik
2	Mutasi dan Promosi ASN		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi
	2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT
	2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala
	2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural
3	Pengembangan Kompetensi ASN		Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan
	3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling
	3.2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya
	3.3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi
	3.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal
	3.5	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat
	3.6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN
	3.7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta
	3.8	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi
	3.9	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
1	3		4
			fungsional
	3.10	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional
	3.11	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK
	3.12	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin
	4.1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluasi Kinerja Aparatur
	4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik
	4.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur
	4.4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan
	4.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya
	4.6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur
	4.7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN
	4.8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
	4.9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS
	4.10	Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sebagai implementasi dari visi dan misi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka proses pembangunan dan pelayanan di bidang kepegawaian ditopang oleh 2 (dua) program yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Kepegawaian Daerah.

Didalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) kegiatan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan untuk Program Kepegawaian Daerah terdiri dari 4 (empat) Kegiatan, diantaranya :

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
2. Mutasi dan Promosi ASN;
3. Pengembangan Kompetensi ASN;
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sa

saran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
A Meningkatkan Layanan Pemerintahan Daerah	A Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			34.667.090.894	Kepala BKD Prov. NTB	Prov. NTB
1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BKD	BB	B	241.280.487	Sekretaris	Prov. NTB
1,1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	19.048.460	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB
1,2 Meningkatkan Kualitas Dokumen RKA-SKPD	1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.048.460	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1,3 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1,3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.048.460	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB
1,4 Meningkatnya Kualitas Penyusunan DPA- SKPD	1,4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.048.460	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB
1,5 Meningkatnya KualitasPenyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 DOkumen	1 DOkumen	19.048.460	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB
1,6 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan RKDP dan RENJA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	19.048.460	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB
1,7 Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	126.989.730	Kasubag. Program dan Pelaporan	Prov. NTB
2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip BKD	BB	B	30.895.376.524	Sekretaris	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
2,1 Meningkatnya Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	90 orang	90 orang	30.666.795.010	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
2,2 Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	2,2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SPJ SPPD	150 Dokumen	150 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
2,3 Meningkatnya Kualitas Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	2,3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPTB/GU	12 Dokumen	12 Dokumen	152.387.676	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
2,4 Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Keuangan	2,4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
2,5 Meningkatnya Kualitas Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	2,5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
2,6 Meningkatnya Kecepatan/Ketepat an Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2,6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP	1 Dokumen	1 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
2,7 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emester	2,7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Dokuman Laporan Realisasi Keuangan Bulan/Triwulan/Se mesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
2,8 Meningkatnya Akurasi Pelaporan Realisasi Anggaran	2,8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
3 Meningkatnya Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dengan Kualitas Baik	90%	90%	69.844.352	Sekretaris	Prov. NTB
3,1 Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Barang Milik Daerah	3,1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
3,2 Meningkatnya Pengamanan BMD	3,2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Daftar Aset	1 Dokumen	1 Dokumen	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
3,3 Meningkatnya Kualitas Penilaian BMD	3,3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	jumlah Aset yang dinilai	5 item	5 item	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
3,4 Meningkatnya Kualitas, Pengawasan dan Pengendalian BMD	3,4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Daftar Inventaris Barang	12 Daftar	12 Daftar	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
3,5 Meningkatkan Kualitas Rekonsiliasi dan Laporan BMD	3,5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset	2 Berita Acara	2 Berita Acara	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
3,6 Meningkatkan Kualitas Penatausahaan BMD	3,6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD	12 Dokumen	12 Dokumen	31.747.433	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
3,7 Meningkatkan Pemanfaatan BMD	3,7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Aset yang dapat dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
4 Meningkatnya Kualitas Administrasi Pendapatan Daerah.	4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah	90%	90%	44.446.406	Sekretaris	Prov. NTB
4,1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	12.698.973	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
4,2 Meningkatkan Kualitas Analisis serta Kebijakan Retribusi Daerah	4,2 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Sosialisasi dan Kerjasama Potensi Retribusi Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
4,3 Meningkatkan Sosialisasi Potensi Retribusi Daerah	4,3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi potensi Retribusi Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	-	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
4,4 Meningkatkan Kualitas data objek retribusi daerah	4,4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek retribusi Daerah	10 objek	10 objek	-	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
4,5 Meningkatkan jumlah potensi retribusi daerah	4,5 Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah potensi retribusi darah	10 dokumen	10 dokumen	31.747.433	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
4,6 Meningkatkan ketepatan wajib retribusi daerah	4,6 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	jumlah pentapan wajib retribusi daerah	10 dokumen	10 dokumen	-	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
4,7 Mningkatnya Laporan retribusi daerah	4,7 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah dokuen laporan retribusi daerah	1 dokumen%	1 dokumen	-	Kasubag. Keuangan	Prov. NTB
5 Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian	5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Layanan	90%	90%	152.387.676	Sekretaris	Prov. NTB
5,1 Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5,1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 jenis	2 jenis	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,2 Meningkatkan Keseragaman Atribut dan Pakaian Dinas	5,2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	3 item	3 item	38.096.919	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,3 Meningkatkan Kualitas Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5,3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Penjagaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
5,4 Meningkatkan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5,4 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate dalam sistem Kepegawaian	90 dokumen	90 dokumen	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,5 Mningkatnya ketepatan dan Kecapatan pelaporan kinerja Pegawai	5,5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah laporan Kinerja Pegawai	90 Laporan	90 Laporan	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,6 Meningkatkan Apresiasi Pegawai Pensiun	5,6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	jumlah apresiasi pegawai pensiun	2 Pegawai	2 Pegawai	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,7 Meningkatkan Kecepatan dan Pelayanan terhadap pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	5,7 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	jumlah pelayanan pemulanagan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	-		-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,8 Meningkatkan Apresiasi Pegawai yang Pindah Tugas	5,8 Pemindahan Tugas ASN	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas	10 pegawai	10 pegawai	12.698.973	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5,9 Meningkatkan Pengebangan kapasitas Pegawai melalui DIKLAT	5,9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT	20 pegawai	20 pegawai	63.494.865	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
5.10 Meningkatkan pemahaman terhadap Peraturan	5.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah peraturan perundang-undangan yang	4 Aturan	4 Aturan	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
perundang-undangan		disosialisasikan					
5.1 1 Meningkatnya kemampuan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan	5.1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	4 aturan	4 aturan	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
6 Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Logistik Kantor	100%	100%	1.561.973.679	Sekretaris	Prov. NTB
6,1 Meningkatnya Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	20 jenis	20 jenis	38.096.919	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
6,2 Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
6,3 Mningkatnya Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	6,3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	3 jenis	25.397.946	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
6,4 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Logistik Kantor	6,4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Kantor yang	12 bulan	12 bulan	444.464.055	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
		tersedia					
6,5	Meningkatnya Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6,5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5 jenis	5 jenis	12.698.973	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Prov. NTB
6,6	Meningkatnya Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	5 jenis	5 jenis	38.096.919	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Prov. NTB
6,7	Meningkatnya Ketersediaan Bahan/Material	6,7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	2 jenis	2 jenis	25.397.946	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Prov. NTB
6,8	Meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu	6,8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	80 kali	80 kali	76.193.838	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Prov. NTB
6,9	Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	761.938.380	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Prov. NTB
6.1 0	Meningkatnya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.1 0 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata	7 bidang	7 bidang	126.989.730	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
6.1 1 Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah fasilitasi e-government	3 aplikasi	3 aplikasi	12.698.973	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7 Meningkatnya Ketersediaan barang Milik Daerah	7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Capaian Fisik RKBMD	20%	20%	239.400.000	Sekretaris	Prov. NTB
7,1 Meningkatnya Ketersediaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	7,1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas yang tersedia	2 unit	-	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7,2 Meningkatnya Ketersediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7,2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 unit	-	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7,3 Meningkatnya ketersediaan Mebel	7,3 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	40 unit	-	-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7,4 Meningkatnya Ketersediaan peralatan dan Mesin	7,4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	4 paket	4 paket	239.400.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7,5 Meningkatnya Ketersediaan Gedung Kantor atau	7,5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang Tersedia	2 paket		-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
					2023			
					Target	Rp.		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
bangunan Lainnya								
7,6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau bangunan Lainnya	7,6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Tersedia	1 paket		-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
7,7	Meningkatnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	7,7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket		-	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8	Meningkatnya Ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100%	100%	916.325.932	Sekretaris	Prov. NTB
8,1	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Surat-menysurat	8,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat-menysurat yang tersedia	6000 surat	6000 surat	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8,2	Meningkatnya Ketersediaan jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	8,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	351.221.634	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
8,3	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Peralatan dan	8,3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan	2 jenis	2 jenis	25.397.946	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
					2023			
					Target	Rp.		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
	Perlengkapan Kantor		Kantor yang tersedia					
8,4	Meningkatnya Ketersediaan pelayanan Umum Kantor	8,4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	16 orang	16 orang	533.356.866	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9 Meningkatkan Pemeliharaan barang Milik Daerah		9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan Kondisi Baik	90%	90%	546.055.839	Sekretaris	Prov. NTB
9,1	Meningkatnya Ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang terpelihara	37 unit	37 unit	253.979.460	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9,2	Meningkatnya ketersediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	2 unit	2 unit	19.048.460	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9,3	Meningkatnya masa pakai Mebel	9,3 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpelihara	2 unit	2 unit	6.349.487	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
9,4 Meningkatnya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	37 unit	37 unit	12.698.973	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9,5 Meningkaynya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,5 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara/terehabi litasi	1 gedung	1 gedung	126.989.730	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9,6 Meningkatnya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,6 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan praarana gedung Kantor yang terpelihara/terehabi litasi	1 tahun	1 tahun	63.494.865	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
9,7 Meningkatnya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,7 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang terpelihara/terehabi litasi	1 tahun	1 tahun	63.494.865	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Prov. NTB
B Meningkatnya Kualitas Sistem Merit	B Program Kepegawaian Daerah	Nilai Penerapan Sistem Merit	237,5	373,0	4.083.943.959	Kepala BKD Prov. NTB	Prov. NTB
1 Meningkatnya kualitas Perencanaan Pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian yang	1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan dan	81	102	1.410.810.142	Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
Terintegrasi		Sistem Informasi					
1,1 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengadaan ASN	1,1 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK	1500 Fomasi	1500 Fomasi	12.698.973	Kasubid. Pengadaan pegawai	Prov. NTB
1,2 Meningkatnya Kualitas perencanaan Kebutuhan PNS/PPPK	1,2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi CPNS/PPPK	400 formasi	400 formasi	38.096.919	Kasubid. Pengadaan pegawai	Prov. NTB
1,3 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Pegawai	1,3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	400 orang	400 orang	634.948.650	Kasubid. Pengadaan pegawai	Prov. NTB
1,4 Mningkatnya Transparansi Pengadaan ASN	1,4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK	10 kab/Kota	10 kab/Kota	63.494.865	Kasubid. Pengadaan pegawai	Prov. NTB
1,5 Meningkatnya Kualitas Perumusan bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1,5 Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 kegiatan	1 kegiatan	12.698.973	Kasubid. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai	Prov. NTB
1,6 Meningkatnya Ketepatan Waktu Pensiun ASN	1,6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	245 SK	245 SK	101.591.784	Kasubid. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1,7 Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pemberhentian ASN	1,7 Evaluasi Pemberhentian ASN	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	1 dokumen	1 dokumen	12.698.973	Kasubid. Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai	Prov. NTB
1,8 Meningkatkan Kesejahteraan ASN	1,8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah kegiatan Fasilitasi KORPRI	4 kegiatan	4 kegiatan	177.785.622	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
1,9 Meningkatkan kualitas database pengelolaan data dan informasi ASN	1,9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1 Aplikasi	1 Aplikasi	63.494.865	Kasubid. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. NTB
1.1.0 Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawian	1.1.0 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	13.950 Pegawai	14.143 Pgawai	115.514.896	Kasubid. Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. NTB
1.1.1 Meningkatkan ketersediaan Dokumen Kepegawaian secara Elektronik	1.1.1 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Tata Naskah yang diakuisisi	13.950 Pegawai	13.950 Pegawai	88.892.811	Kasubid. Dokumentasi dan tata Naskah kepegawaian	Prov. NTB
1.1.2 Meningkatkan evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1.1.2 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	13.950 Pegawai	13.950 Pegawai	88.892.811	Kasubid. Dokumentasi dan tata Naskah kepegawaian	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
2 Meningkatnya Kualitas Mutasi dan Promosi Pegawai	2 Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi	20	32,5	1.041.315.786	Kabid Promosi dan Mutasi ASN	Prov. NTB
2,1 Meningkatnya Ketepatan Penempatan PNS/PTT	2,1 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK	230 SK	126.989.730	Kasubid. Perpindahan dan Status kepegawaian	Prov. NTB
2,2 Meningkatnya Ketepatan Waktu Kenaikan Pangkat ASN	2,2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK	3000 SK	406.367.136	Kasubid. Kepangkatan dan Penggajian Pegawai	Prov. NTB
2,3 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Jabatan Struktural ASN sesuai dengan kompetensinya	2,3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	400 SK	330 SK	507.958.920	Kasubid. Pengembangan Karir JPT dan JA	Prov. NTB
3 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi Pegawai	3 Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Aspek Pengembangan karir, Perlindungan dan pelayanan	39	118,5	1.041.315.786	Kabid Pengembangan Kompetensi ASN dan UPPK	Prov. NTB
3,1 Meningkatnya Produktifitas Kinerja ASN melalui Konseling	3,1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang diberikan Konseling	30 pegawai	30 pegawai	25.397.946	Kasi Promosi dan Pelayanan	Prov. NTB
3,2 Meningkatnya Informasi Kompetensi ASN	3,2 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	400 orang	400 orang	228.581.514	Kasi. Penilaian Kompetensi	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
3,3 Meningkatnya kualitas Administrasi Diklat dan sertifikasi ASN	3,3 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah SPT, Surat Rekomendasi, Surat Ijin Mengikuti Diklat dan Sertifikasi	100 pegawai	100 pegawai	12.698.973	Kasubid.Pemeta an Kompetensi	Prov. NTB
3,4 Meningkatnya Kualifikasi Pendidikan ASN	3,4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	80 orang	80 orang	380.969.190	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
3,5 Meningkatnya koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	3,5 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	10 kerjasama	10 kerjasama	63.494.865	Kasubid.Pemeta an Kompetensi	Prov. NTB
3,6 Meningkatnya Pembinaan dan Supervisi Pemetaan Kompetensi ASN	3,6 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN	10 Dokumen	10 Dokumen	63.494.865	Kasi Promosi dan Pelayanan	Prov. NTB
3,7 Meningkatnya Kualitas Pola Pengembangan Karir ASN	3,7 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Hasil Pemetaan Talenta	300 Pegawai	300 Pegawai	63.494.865	Kasubid.Pemeta an Kompetensi	Prov. NTB
3,8 Meningkatnya sertifikasi jabatan fungsional	3,8 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Jafung dan Uji Kompetensi	20 orang	20 orang	25.397.946	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
3.9 Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan tentang informasi jabatan Fungsional	3.9 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	1 kegiatan	1 kegiatan	12.698.973	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
3.1 0 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir Fungsional ASN sesuai dengan kompetensinya	3.1 0 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK	440 SK	88.892.811	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
3.1 1 Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	3.1 1 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	40 DUPAK/PA K	40 DUPAK/P AK	63.494.865	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
3.1 2 Meningkatnya Kualitas Pengembangan Karir jabatan Fungsional	3.1 2 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Evaluasi Pengembangan karir jabatan Fungsional	2 Dokumen	2 Dokumen	12.698.973	Kasubid. Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Prov. NTB
4 Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan	4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Aspek manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	97,5	120	590.502.245	Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Prov. NTB
4.1 Meningkatnya Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4.1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan tentang Evaluai Kinerja Aparatur	3 Paraturan	3 Paraturan	12.698.973	Kasubid. Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
4.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN	4.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS yang Berkinerja Baik	12.893 pegawai	12.893 pegawai	253.979.460	Kasubid. Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. NTB
4.3 Meningkatkan Kualitas Evaluasi dan Pembinaan Kinerja Aparatur	4.3 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen	19.048.460	Kasubid. Penilaian Kinerja Pegawai	Prov. NTB
4.4 Meningkatkan Pemberian Penghargaan bagi ASN	4.4 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan Pegawai teladan	24 Orang	24 Orang	12.698.973	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
4.5 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Tanda jasa Bagi Pegawai	4.5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	200 Orang	200 Orang	63.494.865	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
4.6 Meningkatkan Kualitas Evaluasi pelaksanaan penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	4.6 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	1 dokumen	1 dokumen	38.096.919	Kasubid. Pendidikan, Cuti dan Kesra	Prov. NTB
4.7 Meningkatkan Disiplin ASN	4.7 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN	46 OPD	46 OPD	126.989.730	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB
4.8 Menurunnya Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	4.8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	30 SK	30 SK	12.698.973	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB

TUJUAN/ SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (outcome) DAN KEGIATAN (output)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCAN AAN			UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJ AWAB	LOKASI
				2023			
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
4.9 Meningkatkan kualitas Mediasi Perceraian Pegawai	4.9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	20 SK	20 SK	12.698.973	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB
4.10 Meningkatkan Evaluasi Disiplin ASN	4.10 Evaluasi Disiplin ASN	jumlah Laporan Disiplin ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	38.096.919	Kasubid. Evaluasi dan Disiplin Pegawai	Prov. NTB
Jumlah Pagu Anggaran Indikatif					38.751.034.852		Prov. NTB

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BKD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan program / kegiatan di lingkungan BKD Provinsi NTB.

Rencana Kerja ini akan menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi tolak ukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja ini tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Dalam kaitan ini diharapkan peran serta seluruh pimpinan, karyawan dan karyawan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakannya.

Dengan adanya Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 ini diharapkan agar:

1. Semua aparat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja ini secara konsisten dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan secara tepat dan terarah dengan memaksimalkan semua potensi, sarana dan prasarana yang dimiliki, berdaya guna dan berhasil guna serta berkelanjutan.
2. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat dijadikan sebagai pedoman, acuan dan dasar dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat dan berkewajiban melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada.
3. Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Strategis serta dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan dapat diwujudkan dengan tindakan kinerja yang lebih proaktif, aspiratif, akomodatif dan partisipatif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, sinergi antar pelaku pembangunan lintas kabupaten/kota, antar wilayah dan kawasan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kesamaan pola pikir dan pola tindak guna mewujudkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Hubungan kerja dan koordinasi antar bidang merupakan kunci keberhasilan dalam melaksanakan rencana kerja ini. Melalui partisipasi, semangat dan komitmen, diharapkan Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan secara substansial merupakan refleksi dari tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Profesional dan Melayani.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Drs. MUHAMMAD NASIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640412 199003 1 013